

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, HMA., 2010, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *KUHP kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Priya Santosa, Bima, dkk, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Paramadina Public Policy Institute.
- Puryanto, Hendrat, 2004, *Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara Di Inonesia*, Surakarta: Krakatau Surakarta
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Utsman, Sabian, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NOMOR: M.04-PR.07.03 TAHUN 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Dirjend PEMASYARAKATAN No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang JUKLAK dan JUKNIS Pengelolaan BASAN/BARAN di RUPBASAN

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Mahkamah Agung RI, Menteri Keuangan RI No: 1 Tahun 2011, No: Kep/259/A/JA/12/2011, No:KEPB-01-55/55/11/2011, NO: M.HH-10.HM.0302 Tahun 2011, No:19/KMA.04/2011, No: 219/PMK.04/2011 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara.